

RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Bulan: Juli 2026

Oleh: RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Admindak) disusun sebagai penyempurnaan atas UU No. 23 Tahun 2006 yang sebelumnya telah diubah melalui UU No. 24 Tahun 2013. Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan sekaligus mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas resmi penduduk untuk mendukung verifikasi data dan pelayanan publik.

Perubahan kedua diusulkan oleh Komisi II DPR RI dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Pembahasannya diprioritaskan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital nasional melalui pengembangan NIK menjadi *Single Identity Number* (SIN). Melalui perubahan ini, pemanfaatan NIK direncanakan tidak hanya untuk layanan seperti NPWP, BPJS Kesehatan, dan SIM, tetapi juga diperluas ke sektor pendidikan, perbankan, kesehatan, pemilihan umum, hingga penegakan hukum. Selain itu, sistem administrasi kependudukan akan diarahkan menuju stelsel aktif digital yang terintegrasi dengan ekosistem data kependudukan nasional.

Hingga Juli 2026, RUU Admindak masih dalam tahap pembahasan antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah. Selain mendukung integrasi layanan publik, pembahasannya juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi, keamanan siber, interoperabilitas antarsistem, serta penyelarasan dengan RUU Satu Data Indonesia. Melalui perubahan ini, diharapkan tata kelola data kependudukan Indonesia menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan mampu mendukung transformasi digital tanpa mengabaikan hak privasi masyarakat.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk	https://emedia.dpr.go.id/news/\n2026/04/20/aria-bima-soroti-ke\namanan-data-dan-pendanaan-admi\nnduk
Berita	Integrasi Data Terhambat, Komisi II Soroti Mandat Pengelolaan yang Belum Jelas	https://www.dpr.go.id/kegiatan\n-dpr/berita/Integrasi-Data-Ter\nhambat-Komisi-II-Soroti-Mandat\n-Pengelolaan-yang-Belum-Jelas-\n64593
Berita	Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu	https://www.dpr.go.id/kegiatan\n-dpr/berita/Komisi-II-Dorong-R\nevisi-UU-Adminduk-Fondasi-Utam\na-Perbaikan-Layanan-Publik-Ter\npadu-64581
Berita	Legislatur Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional	https://www.dpr.go.id/kegiatan\n-dpr/berita/Legislatur-Usul-Du\nkcapil-Ambil-Peran-Utama-Koord\ninasi-Satu-Data-Nasional-64587
Berita	Perubahan RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal	https://www.dpr.go.id/kegiatan\n-dpr/berita/Perubahan-RUU-Admi\nnduk-Pertegas-Transformasi-Lay\nanan-NIK-Akan-Jadi-Identitas-T\nunggal-66851
Dokumen	LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA ADMINDUK KOMISI II DPR RI KE KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021, 25 MARET 2021	https://www.dpr.go.id/search?k\nyword=Komisi%20II%20Adminduk\n
Dokumen	LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA ADMINDUK KOMISI II DPR RI KE PROVINSI D.I. YOGYAKARTA PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021, 25 MARET 2021	https://www.dpr.go.id/search?k\nyword=Komisi%20II%20Adminduk
Undang-undang & Peraturan	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/38985/uu-no-24-tahun-201\n3
Undang-undang & Peraturan	Proses Legislasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	https://www.dpr.go.id/kegiatan\n-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legisla\nsi/partisipasi-legislasi/detai\nl/RUU-tentang-Perubahan-Kedua-\natas-Undang-Undang-Nomor-24-Ta\nhun-2013-tentang-Perubahan-ata\ns-Undang-Und-629
Surat kabar	Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pada Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	https://repositori.dpr.go.id/i\nnd/eprint/14